

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Desa merupakan unit organisasi terkecil dalam satuan pemerintahan daerah. Dijelaskan lebih rinci dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2014 bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keberjalanan sistem pemerintahan desa tidak lepas dari tanggung jawab dan peran aktif dari perangkat desa. Sebagai sumber daya utama, perangkat desa sangat di tuntut untuk memberikan kinerja terbaiknya guna mencapai target yang diharapkan.

Tingkat keberhasilan tugas dan tanggung jawab perangkat desa dapat dilihat dari keberhasilan dalam menjalankan program pemerintahan, salah satunya yaitu percepatan dalam pembangunan desa. Pengalokasian dana pembangunan secara tepat guna menggambarkan bahwa desa mampu memenuhi tujuan utama penggunaan dana desa. Dana desa sendiri bersumber dari dana APBN yang diperuntukan bagi desa melalui APBD Kabupaten/Kota. Pengalokasian dana tersebut bertujuan untuk mewujudkan pemerataan dalam pembangunan.

Pemerintah desa merupakan unsur utama penyelenggaraan pemerintah desa, Nurcholis (2011) menjelaskan bahwa pemerintah desa sendiri memiliki tugas pokok, meliputi:

- a. Melaksanakan urusan rumah tangga desa, urusan pemerintahan umum, membangun dan membina masyarakat.
- b. Menjalankan tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten. Dari tugas pokok tersebut lahir fungsi pemerintah desa yang berhubungan langsung dengan situasi sosial dalam kehidupan bermasyarakat.

Proyek pembangunan desa gencar-gencaran dilakukan oleh pemerintah guna pemerataan dalam pembangunan. Akan tetapi dalam teknis pelaksanaan dilapangan sendiri seringkali tersendat. Alokasi dana desa yang kurang efektif, diimbangi dengan masyarakat kurang pro-aktif sering kali menjadi alasan utama dalam program pembangunan kurang berjalan dengan baik. Selain itu, sistem manajemen pemerintah yang dilakukan secara optimal akan menghasilkan timbal balik yang efektif dan efisien. Tidak hanya itu, penyajian laporan keuangan berkaitan dengan pembukuan berkaitan dengan transaksi keuangan merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban pemerintahan desa untuk memberikan laporan alokasi dana yang diberikan pemerintah

Dikutip dalam www.murianews.com serapan dana alokasi daerah di Kecamatan Sukolilo terbilang cukup rendah. Hanya sebesar hanya 30,61 persen dari total keseluruhan dana yang diberikan teralokasikan dengan baik. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kabupaten Pati Marno mengatakan, sesuai dengan data yang dimiliki, untuk serapan anggaran Dana Desa tertinggi di Pati yakni di Kecamatan Dukuhseti. Kemudian yang paling rendah adalah di Kecamatan Sukolilo. “Dukuhseti dengan pagu Rp 14,16 miliar, sudah

teralisasi Rp 7,13 miliar atau 50,37 persen. Sedangkan Sukolilo dengan pagu anggaran Rp 24,89 miliar, terealisasi sebesar Rp 7,71 miliar atau 30,61 persen.”.

Akuntabilitas merupakan salah satu pilar utama dalam tata Kelola pemerintahan yang baik. Akuntabilitas sendiri merupakan kewajiban-kewajiban individu yang diberikan kepercayaan dalam pengelolaan sumber daya publik, serta individu tersebut mampu mempertanggung jawabkan kepada pihak yang berwenang (Teguh Arifiyadi, 2008). Sedangkan Mardiasmo (2009) menjelaskan bahwa akuntabilitas publik merupakan kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Secara garis besar akuntabel yaitu setiap kegiatan atau program desa harus dapat dipertanggungjawabkan oleh pemerintahan desa kepada masyarakat. Anggaran yang akuntabel sendiri merupakan suatu anggaran yang direncanakan sesuai dengan kebutuhan, serta dalam proses dan pelaksanaannya melibatkan masyarakat guna mencapai tujuan otonomi daerah.

Hardiningsih, O, Srimindarti, & Kristiana (2019) menjelaskan terdapat 3 faktor akuntabilitas yaitu penyajian laporan keuangan, pengendalian internal dan aksesibilitas. Penyajian laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan memiliki andil yang sangat besar. Pemerintah daerah dituntut untuk mampu menyusun laporan keuangan sesuai dengan standart yang ditentukan seperti laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas maupun catatan atas laporan keuangan. Semakin baik penyajian laporan maka semakin jelas pula pelaporan

alokasi dana yang diberikan (Hardiningsih, O, Srimindarti, & Kristiana, 2019). Selain itu aksesibilitas laporan keuangan juga menjadi faktor pembentuk akuntabilitas. Hal ini terjadi karena pada hakikatnya akuntabilitas merupakan salah satu pilar utama dalam tata kelola pemerintahan yang baik, dimana diperlukan adanya tanggung jawab dan transparansi dalam pengelolaan dana daerah.

Terwujudnya akuntabilitas salah satunya dipelopori dengan adanya aksesibilitas laporan keuangan dimana hal ini akan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi secara terbuka, kemudahan dalam mengakses, serta adanya pemahaman pada masyarakat terkait pengalokasian dana tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh Miftahul Reza Fauziyah (2017) dengan judul Pengaruh Penyajian dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan bahwa penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Semakin baik penyajian laporan keuangan dan semakin baik aksesibilitas laporan keuangan tersebut maka akan semakin baik pula akuntabilitas pengelolaan keuangan.

Kecamatan Sukolilo merupakan salah satu kecamatan yang terletak di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Terdapat 16 desa yang tersebar di kecamatan Sukolilo meliputi desa Baleadi, Baturejo, Cengkalsewu, Gadudero, Kasiyan, Kedumulyo, Kedungwinong, Kuwawur, Pakem, Porangparing, Prawoto, Sukolilo, Sumbersoko, Tompegunung, Wegil dan Wotan dengan total 483 RT dan 80 RW.

Berada di ujung selatan Kabupaten Pati, Kecamatan Sukolilo dikenal dengan kecamatan yang luas dengan beberapa wilayah terletak di daerah pegunungan kapur.

Dalam laman tersebut dijelaskan alasan utama realisasi anggaran tidak dialokasikan secara maksimal lantaran bersamaan dengan pelaksanaan pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak 215 desa. Sehingga beberapa keterlambatan, termasuk pencairan dana desa yang sempat ditunda juga untuk desa penyelenggara pilkades. Melihat fenomena tersebut, peran perangkat desa sebagai salah satu garda utama dalam pemerintahan desa ikut diperhitungkan. Dibutuhkan adanya penyajian laporan keuangan serta adanya aksesibilitas laporan keuangan yang baik guna mencapai akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintahan desa. Seperti diketahui pula bahwa pemerintahan desa memiliki tanggung jawab menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang dilakukan kepada pihak-pihak terkait.

Penelitian yang dilakukan oleh Desi Harianti (2019) dengan judul Pengaruh Perangkat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (studi kasus Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perangkat desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai. Selain itu, Penelitian yang dilakukan oleh Musdalifa (2020) dengan judul Pengaruh Peran Perangkat Desa, Aksesibilitas Laporan Keuangan dan Sistem Akuntansi Keuangan Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Kecamatan Temon dengan analisis regresi berganda. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 45 responden. Hasil penelitian menunjukkan variabel peran perangkat

desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Variabel Aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Serta, variabel Sistem Akuntansi Keuangan Desa tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Penelitian yang dilakukan oleh Tri Yuli Astuti (2019) dengan judul Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Informasi Desa dan Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Danasari, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang. Jumlah responden penelitian sebanyak 42 responden. Sampel terdiri dari Kepala Dusun, RT, RW dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Danasari, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang. Adapun hasil penelitian variabel penyajian laporan keuangan, aksesibilitas informasi desa dan partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Desa Danasari, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan, apabila semakin baik penyajian laporan keuangan, aksesibilitas informasi desa dan partisipasi masyarakat maka akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di desa Danasari, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang akan semakin baik.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, adalah terletak pada studi empiris atau lokasi penelitian. Musdalifa (2020) melakukan penelitian di Kecamatan Temon. Dan Astuti, Tri Yuli (2019) di Desa Danasari Kecamatan Pemalang. Sedangkan dalam penelitian ini, penulis akan meneliti semua desa di Kecamatan Sukolilo.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti memutuskan untuk mengangkat judul penelitian **Pengaruh Peran Perangkat Desa, Aksesibilitas Laporan Keuangan Sistem Akuntansi Keuangan Desa dan Penyajian Laporan Keuangan Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Desa-Desa Di Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati).**

1.2. Ruang Lingkup

Berdasarkan latar belakang di atas, terdapat banyak permasalahan yang harus ditangani. Tujuan pembatasan masalah agar supaya penelitian ini berjalan dengan baik dan lancar. Ruang lingkup penelitian ini antara lain:

1. Objek penelitian ini yaitu di desa-desa di kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati.
2. Variabel yang diteliti meliputi variabel eksogen yaitu peran perangkat desa, aksesibilitas laporan keuangan, sistem akuntansi keuangan desa dan penyajian laporan keuangan, variabel endogen yaitu akuntabilitas pengelolaan keuangan.
3. Responden yang diteliti yaitu perangkat desa.
4. Penelitian dilakukan selama 1 bulan.

1.3. Perumusan Masalah

Masalah dalam penelitian ini telah dirumuskan sebagai berikut dilihat dari konteks dan ruang lingkungannya:

1. Apakah peran perangkat desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan?
2. Apakah aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan?

3. Apakah sistem akuntansi keuangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan?
4. Apakah penyajian laporan keuangan berpengaruh positif akuntabilitas pengelolaan keuangan?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, terdapat beberapa hal yang hendak dicapai dalam penelitian ini, antara lain:

1. Menganalisis pengaruh peran perangkat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan;
2. Menganalisis pengaruh aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan;
3. Menganalisis sistem akuntansi keuangan desa terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan;
4. Menganalisis pengaruh penyajian laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan.

1.5 Kegunaan Penelitian

Manfaat penelitian ini antara lain:

1.5.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih dalam bidang ilmu akuntansi, lebih khususnya berkaitan dengan variabel yang sedang diteliti. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya, serta menambah wawasan keilmuan bagi mahasiswa.

1.5.2 Manfaat Praktis

➤ Bagi Subjek Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sarana evaluasi atau pengkajian terkait pelaksanaan pelaporan keuangan oleh perangkat desa di wilayah Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati.

➤ Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi tambahan bagi variabel perangkat desa, aksesibilitas laporan keuangan dan penyajian laporan keuangan, serta akuntabilitas pengelolaan keuangan untuk dikembangkan lebih lanjut pada penelitian selanjutnya.